



2022

RENCANA AKSI KINERJA
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan YME karena berkat karunia serta rahmat-Nya, Rencana Aksi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2022 dapat kami selesaikan tepat waktu. Rencana Aksi Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk menetapkan target kinerja secara periodik dan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja di akhir tahun yang tepat sasaran yang mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Demikian Rencana Aksi Balai Perekerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2022 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Bandung, 28 Januari 2022

Kepala Balai Perkerasan dan
Lingkungan Jalan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Kapasitas SDM Organisasi	3
BAB 2 PERJANJIAN KINERJA KINERJA	5
2.1 Indikator Kinerja Sasaran Program	5
2.2 Indikator Kinerja Kegiatan	5
2.3 Indikator Kinerja Output	5
BAB 3 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER BULAN	7
3.1 Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan	7
3.1.1 Target Keuangan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022	7
3.1.2 Target Fisik Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022	10
BAB 4 PENUTUP	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Sasaran Program	5
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terhadap Direktorat Jenderal Bina Marga	5
Tabel 3 Target Indikator Kinerja Output	6
Tabel 4 Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA	8
Tabel 5 Rencana Keuangan Per Paket Pekerjaan TA 2022 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	9
Tabel 6 Rencana Fisik Per Paket Pekerjaan TA 2021 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	3
Gambar 2 Sebaran Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	3
Gambar 3 Sebaran Jabatan Fungsional di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	4

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP pada kementerian negara / lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Rencana Aksi Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang target capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan rencana kerja bulanan yang ditetapkan sehingga target tahunan pada tahun anggaran 2022 dapat tercapai.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Permen PUPR 16/PRT/M/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPLJ menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisa beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survei atau inspeksi termasuk pelaksanaan alih teknologinya;
- b. pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisa beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survey atau inspeksi;
- c. pelaksanaan uji laboratorium, lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang jalan dan jembatan;

- d. pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisa beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survey atau inspeksi berupa:
 - 1) penilaian kualitas konstruksi;
 - 2) pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi; dan
 - 3) mitigasi bencana alam;
- e. pengembangan sistem monitoring bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisa beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survey atau inspeksi; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara.

1.3 Struktur Organisasi

Sebagai manifestasi dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka disusun: i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; iii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar penjabaran struktur organisasi dan pelaksanaan tugas serta fungsi seluruh unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai unit kerja di bawahnya.

Dengan adanya Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagaimana ditunjukan pada **Gambar 1** diharapkan peran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan daim kegiatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dapat berjalan dengan baik.

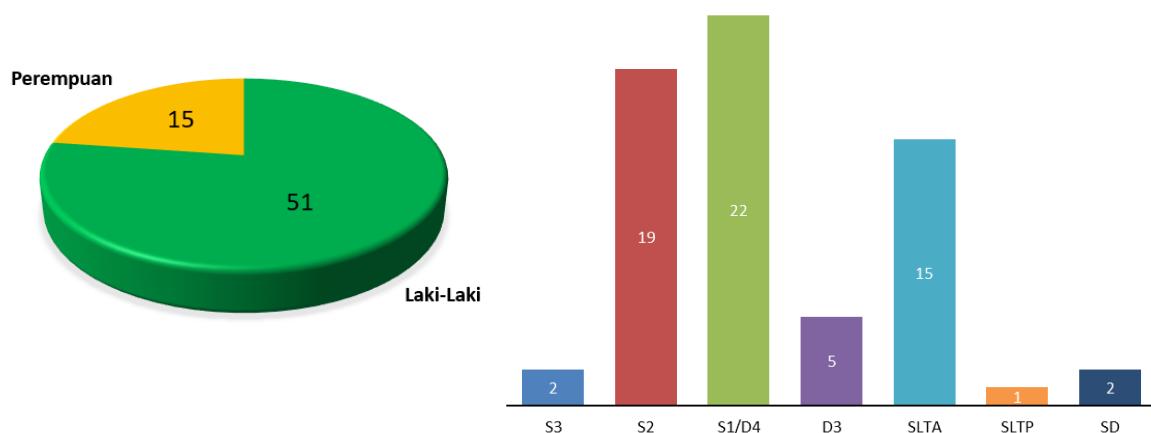


Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

1.4 Kapasitas SDM Organisasi

Sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. SDM merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. SDM menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan.

Saat ini, Struktur organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan didukung oleh sejumlah sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan, usia, dan pangkat/golongan. Total keseluruhan jumlah pegawai di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan adalah 66 orang, yang terdiri dari 49 orang PNS dan 17 orang Non-PNS. Adapun sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada awal tahun 2021 sebagaimana yang terlihat pada **Gambar 2**. Sementara untuk sebaran jabatan fungsional dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Gambar 2 Sebaran Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan



Gambar 3 Sebaran Jabatan Fungsional di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

BAB 2 PERJANJIAN KINERJA KINERJA

2.1 Indikator Kinerja Sasaran Program

Indikator Kinerja Sasaran Program Balai Perkerasan dan Lingkungan jalan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1 Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021		Target 2022	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional				
	IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100	%	100	%
	Parameter Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	100,00	%	100,00	%
	Parameter Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR				
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100	%	100,00	%
	Parameter Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	100,00	%	100,00	%

2.2 Indikator Kinerja Kegiatan

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mendukung program Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai Renstra PUPR tahun 2020-2024 yaitu **Infrastruktur Konektivitas** melalui Kegiatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang diatur dalam perjanjian kinerja sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 2**.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terhadap Direktorat Jenderal Bina Marga

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021		Target 2022	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional				
	IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100	%	100	%
	Parameter Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	100,00	%	100,00	%
	Parameter Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen
	Rincian Output				
	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan

Selain itu, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan juga ikut mendukung program internal Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas manajemen birokrasi Ditjen Bina Marga melalui Kegiatan Dukungan Manajemen.

2.3 Indikator Kinerja Output

Kemudian masing-masing Indikator kinerja tersebut memiliki sub komponen/paket yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Rincian target pencapaian indikator kinerja output balai di tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3 Target Indikator Kinerja Output

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET 2022
1	Jumlah Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	PA Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Dokumen Rekomendasi	1
		PC Alat Ukur Ketidakrataan Jalan	Unit/Buah	1
		PD Alat Ukur Topografi	Unit/Buah	1
		PE Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Layanan	1
2	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	PM Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Layanan	1
3	Jumlah Layanan Umum	PK Administrasi Kesatkeran	Layanan	1
		PL Operasional Pimpinan	Layanan	1
4	Jumlah Layanan Perkantoran	PH Belanja Uang Lembur	Layanan	1
		PI Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	Layanan	1
		PJ Operasional Perkantoran	Layanan	1
5	Jumlah Layanan Sarana Internal	PG Pengadaan Kantor dan Laboratorium	Unit	1

BAB 3 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER BULAN

3.1 Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka pemenuhan target tahunan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menetapkan target kinerja bulanan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. Target kinerja bulanan secara umum diuraikan pada **Tabel 2**. Sedangkan rincian target kinerja keuangan dan fisik untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 3** dan **Tabel 4**.

3.1.1 Target Keuangan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Tabel 4 Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	Rencana Keuangan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	0,00	0,00	0,78	2,93	5,65	11,50	20,09	29,13	40,91	54,83	86,26	100,00
4979	Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,78	2,93	5,65	11,50	20,09	29,13	40,91	54,83	86,26	100,00
52	Belanja Barang	-	-	0,90	3,58	6,95	14,26	24,83	35,89	50,45	67,72	83,38	100,00
53	Belanja Modal	-	-	0,48	1,27	2,35	4,45	7,98	11,88	16,57	21,92	93,62	100,00
WA	Program Dukungan Manajemen	4,49	10,29	17,91	24,50	37,07	46,17	59,92	67,15	79,32	87,81	94,59	100,00
4484	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	4,49	10,29	17,91	24,50	37,07	46,17	59,92	67,15	79,32	87,81	94,59	100,00
51	Belanja Pegawai	-	-	8,33	16,67	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	83,33	100,00
53	Belanja Modal	-	-	-	-	35,15	35,15	70,30	70,30	100,00	100,00	100,00	100,00
52	Belanja Barang	5,29	12,13	20,99	28,63	37,57	48,16	58,49	66,89	76,24	86,13	93,88	100,00
TOTAL		1,82	4,18	7,74	11,69	18,42	25,58	36,27	44,58	56,51	68,23	89,65	100,00

Tabel 5 Rencana Keuangan Per Paket Pekerjaan TA 2022 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

No	Kode	Kegiatan/Output/Paket	Rencana Keuangan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	4484	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	4,49	10,29	17,91	24,50	37,07	46,17	59,92	67,15	79,32	87,81	94,59	100,00
2	4484.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,22	11,95	20,80	28,45	37,38	47,95	58,24	66,65	75,98	85,84	93,72	100,00
3	4484.EBA.960.058.PM	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00
4	4484.EBA.962.054.PK	Administrasi Kesatkeran	0,00	0,00	2,00	4,54	9,08	24,08	41,08	51,08	61,08	76,08	89,08	100,00
5	4484.EBA.962.054.PL	Operasional Pimpinan	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00
6	4484.EBA.994.001.PH	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	8,33	16,67	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	83,33	100,00
7	4484.EBA.994.002.PI	Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	0,00	4,07	15,99	21,36	33,29	47,39	60,57	67,30	79,22	93,33	98,70	100,00
8	4484.EBA.994.002.PJ	Operasional Perkantoran	0,70	7,67	15,64	26,71	34,38	49,23	62,58	74,85	84,25	91,63	98,90	100,00
9	4484.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	35,15	70,30	70,30	100,00	100,00	100,00	100,00
10	4484.EBB.951.053.PG	Pengadaan Kantor dan Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	35,15	70,30	70,30	100,00	100,00	100,00	100,00
11	4979	Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,78	2,93	5,65	11,50	20,09	29,13	40,91	54,83	86,26	100,00
12	4979.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	0,00	0,00	0,78	2,93	5,65	11,50	20,09	29,13	40,91	54,83	86,26	100,00
13	4979.ABF.001.102.PA	Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	0,00	0,00	0,00	3,18	6,75	15,68	26,19	36,11	51,41	70,59	87,60	100,00
14	4979.ABF.001.317.PC	Alat Ukur Ketidakrataan jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15	4979.ABF.001.317.PD	Alat Ukur Topografi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
16	4979.ABF.001.404.PE	Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	0,00	0,00	1,75	3,96	7,13	12,93	23,55	35,68	49,54	65,01	79,40	100,00
TOTAL			1,82	4,18	7,74	11,69	18,42	25,58	36,27	44,58	56,51	68,23	89,65	100,00

3.1.2 Target Fisik Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Tabel 6 Rencana Fisik Per Paket Pekerjaan TA 2021 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

No	Kode	Kegiatan/Output/Paket	Rencana Fisik											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	4484	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	6.09	13.15	20.85	29.52	41.38	51.05	62.12	71.47	85.34	92.12	97.32	100.00
2	4484.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.08	15.27	24.21	31.87	40.80	51.36	61.65	70.10	83.79	90.85	96.89	100.00
3	4484.EBA.960.058.PM	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	10,33	20,67	29,00	37,33	45,67	54,00	62,33	70,66	87,00	90,24	95,66	100,00
4	4484.EBA.962.054.PK	Administrasi Kesatkeran	0,00	4,50	8,00	10,54	15,08	30,08	47,08	58,00	67,08	82,08	95,08	100,00
5	4484.EBA.962.054.PL	Operasional Pimpinan	10,00	20,67	29,00	37,33	45,67	54,00	62,33	70,67	79,00	87,33	95,67	100,00
6	4484.EBA.994.001.PH	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	10,33	18,67	27,00	35,33	43,66	52,00	60,33	68,66	85,33	100,00
7	4484.EBA.994.002.PI	Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	2,00	6,07	17,99	23,36	35,29	49,39	62,57	69,30	81,22	95,33	100,00	100,00
8	4484.EBA.994.002.PJ	Operasional Perkantoran	2,70	9,67	17,64	28,71	36,38	51,23	64,58	76,85	86,25	93,63	100,00	100,00
9	4484.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00	49,15	65,00	80,00	95,00	100,00	100,00	100,00
10	4484.EBB.951.053.PG	Pengadaan Kantor dan Laboratorium	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00	49,15	65,00	80,00	95,00	100,00	100,00	100,00
11	4979	Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.07	3.32	4.35	6.18	8.92	16.69	23.34	52.29	70.26	87.45	100.00	100.00
12	4979.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2.07	3.32	4.35	6.18	8.92	16.69	23.34	52.29	70.26	87.45	100.00	100.00
13	4979.ABF.001.102.PA	Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	2,00	4,20	5,50	7,18	10,75	25,00	30,19	65,67	75,45	90,12	100,00	100,00
14	4979.ABF.001.317.PC	Alat Ukur Ketidakrataan jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	4979.ABF.001.317.PD	Alat Ukur Topografi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	4979.ABF.001.404.PE	Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	3,00	4,00	5,25	7,95	11,17	16,93	27,55	39,68	53,54	80,00	100,00	100,00
TOTAL			3.70	7.31	11.06	15.66	22.11	30.65	39.09	60.08	76.39	89.35	98.91	100.00

BAB 4 PENUTUP

Angka target pada Rencana Aksi berlaku sebagai pedoman atau acuan dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja setiap bulan. Angka tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan posisi kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan secara periodik (bulanan). Dengan adanya rencana aksi kinerja ini, deviasi capaian kinerja yang di bawah target rencana (realisasi kinerja < 30% terhadap target) dapat diketahui oleh manajemen Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan gambaran mengenai permasalahan agar capaian pada bulan-bulan berikutnya dapat tetap positif yang pada akhirnya mencapai target tahunan.

Adapun saran untuk perbaikan pelaporan kinerja ke depan adalah:

1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan monitoring dan kinerja bulanan;
2. Pemantauan secara intensif terhadap pelaporan e-monitoring dan SiPP Terpadu, serta melakukan update dan penginputan data pada e-monitoring dan SiPP Terpadu secara berkala agar data yang diperoleh minim kesalahan dan dapat diandalkan; dan
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja secara berkala.